

## BAB V

### Kesimpulan

Peran USAID di Indonesia pasca reformasi yaitu melalui perjanjian kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah disepakati oleh dua belah pihak negara, yakni Amerika Serikat diwakili oleh USAID dan Indonesia diwakilkan oleh Bappenas pada tahun 2005. Mengacu pada istilah *deepening democracy*, berbagai kalangan mengatakan bahwa Indonesia masih pada tahap awal perkembangan demokrasi.

Proses perubahan menuju masyarakat demokrasi yang dialami oleh Indonesia terwujud dalam beberapa hal. Salah satunya adalah perubahan tata kelola pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang luas, bahkan mencakup menjalin hubungan dan kerjasama luar negeri. Jika peluang ini diambil maka proses otonomi daerah akan mampu membawa kemakmuran bagi masyarakat setempat.

Pelaksanaan program DDG dalam rangka untuk mewujudkan *deepening democracy* di Indonesia merupakan sebagian kecil dari keseluruhan peran USAID dalam bentuk hibah. Bantuan yang diberikan USAID kepada Indonesia melalui program DDG dialokasikan sepenuhnya untuk program pembangunan dan desentralisasi pemerintah Indonesia yang demokratis. Dalam rangka mewujudkan

program DDG tersebut, USAID memberikan bantuan dana sebesar 120 juta dolar. Adapun fokus dari program DDG adalah pada tiga kerangka tujuan dan ruang lingkup untuk mencapai *good governance*, yaitu pemerintah daerah yang efektif, konsolidasi agenda reformasi dan penanganan konflik & mendorong pluralisme.

Tujuan yang pertama yaitu pemerintahan daerah (*Local Governance*) yang efektif dan partisipatif. Program tersebut mengusahakan agar pemerintahan daerah dapat diperkuat dan masyarakat sipil seperti CSO (*Civil Society Organizations*) atau media dapat membantu untuk mencapai perencanaan partisipatif dan perbaikan pelayanan publik. Tujuan yang kedua adalah konsolidasi agenda reformasi. Program konsolidasi agenda reformasi lebih difokuskan pada perhatian peningkatan kapasitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, terutama lembaga penyelenggara negara yang masih baru dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai Konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku seperti lembaga pemerintah di pusat, lembaga DPR dan Lembaga DPD. Lembaga-lembaga tersebut sangatlah signifikan menghasilkan berbagai kebijakan berupa undang-undang yang berlaku bagi masyarakat secara meluas.

Tujuan yang terakhir adalah penanganan konflik dan mendorong pluralisme. Dalam mengatasi persoalan konflik terdapat dua institusi yang perlu mendapatkan prioritas, yaitu pemerintah dan masyarakat sipil. Kedua lembaga tersebut merupakan ujung tombak untuk dapat menyelesaikan dan mencegah konflik yang terjadi di daerahnya/lingkungan masing-masing. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian

adalah bahwa munculnya berbagai konflik tersebut merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan di dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, upaya mendasar untuk mencegah dan menangani konflik adalah dengan membangun kepercayaan (*trust building*) di antara masyarakat yang berkonflik melalui berbagai dialog dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang kreatif dan inovatif yang merupakan wujud adanya ikatan kebangsaan.

Peran USAID dalam *democracy assistance* di Indonesia dalam mencapai kemajuan reformasi dari tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun ada beberapa unsur yang masih kurang menjanjikan, karena disebabkan beberapa faktor dari dalam pemerintahan ataupun masyarakat sendiri, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bagaimapun juga desentralisasi yang diberlakukan pada sebuah rezim tentunya memiliki tantangan dan kekurangan serta ada batasnya dalam mempromosikan tata pemerintahan yang baik di sebuah negara.

Tantangan utama bagi konsolidasi demokrasi dan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah kurang efektifnya pemerintahan lokal yang demokratis dalam menyediakan pelayanan publik yang bermakna, karena kurangnya informasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian adanya kegagalan dalam sektor peradilan dalam hal memerangi korupsi yang meluas, serta upaya dalam mewujudkan akuntabilitas serta kredibilitas masyarakat. Tantangan signifikan juga datang dari

dalam elit politik yang secara terus menerus terjadi di berbagai wilayah dalam birokrasi.

Melihat data di lapangan, penting bagi praktisi dan akademisi hubungan internasional untuk melakukan pembenahan terhadap aktivitas kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Langkah pertama dan paling mendesak adalah melakukan sosialisasi terkait pentingnya kerjasama luar negeri di era globalisasi ini. Kemudian, perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme dan tata cara inisiasi kerjasama luar negeri yang benar. Asosiasi jurusan ilmu hubungan internasional juga dapat berperan aktif dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan personalia di pemerintah daerah.

